



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PROTES BURUH TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI

Hartini Retnaningsih

Analisis Legislatif Ahli Utama
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 3 September 2022, Presiden Joko Widodo menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dari harga Rp7.650,00 menjadi Rp10.000,00 per liter. Hal ini menuai kritik dari masyarakat karena kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Namun, Pemerintah memiliki pertimbangan bahwa subsidi BBM selama ini telah salah sasaran dan harga BBM bersubsidi saat ini jauh dari harga minyak dunia.

Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi “pukulan” berat bagi masyarakat termasuk para buruh yang selama ini dikenal sering berdemo memperjuangkan nasibnya. Terkait kenaikan BBM bersubsidi, protes para buruh terus bergaung hingga beberapa hari terakhir dengan tujuan menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada tanggal 6 September 2022, buruh melakukan demo di depan Gedung DPR RI dan Patung Kuda Jakarta Pusat. Buruh menuntut 3 hal, yaitu: 1) Tolak kenaikan harga BBM; 2) Tolak *omnibus law* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan 3) Naikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 sebesar 10-13%. Bahkan, buruh menuntut agar DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) menurunkan harga BBM bersubsidi. Sejalan dengan ini, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 September 2022, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan *walk out* sebagai aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi lain, untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi, Pemerintah menyediakan tiga program bantuan sosial, yaitu: 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga kurang mampu yang masing-masing mendapat Rp600.000,00 dan diberikan dalam dua tahap di bulan September dan Desember; 2) Subsidi gaji sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja yang masing-masing mendapat Rp600.000,00; 3) Subsidi 2% sebesar Rp2,17 triliun berupa dana transfer umum Pemerintah Daerah untuk angkutan umum, ojek, dan nelayan. Selain itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan pekerja dengan gaji senilai upah minimum. BSU diberikan kepada peserta aktif Program Jamsostek hingga bulan Juli 2022. Namun menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), BSU tidak efektif melindungi daya beli masyarakat termasuk buruh. Hal ini dikarenakan BSU hanya diberikan kepada buruh yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jamsostek, sementara banyak buruh lainnya yang rentan namun tidak menerima BSU. Menurut Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBSI), kenaikan upah buruh perlu selaras dengan tren inflasi. Tanpa perbaikan kondisi upah, ditambah dengan kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok, maka daya beli buruh bisa tergerus hingga 30%.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu memberikan atensi terhadap protes kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh para buruh. Komisi IX DPR RI perlu mendorong dan mengawasi Pemerintah dalam menjalankan program-program bantuan sosial pascakenaikan harga BBM bersubsidi, terutama yang terkait dengan kompensasi atau pengalihan subsidi BBM untuk buruh. Komisi IX DPR RI perlu memastikan agar Pemerintah dapat menyalurkan BSU kepada buruh yang berhak secara efektif dan tepat sasaran. Komisi IX DPR RI perlu melakukan diskusi secara terus-menerus dengan Pemerintah dalam rangka memperbaiki nasib buruh. Komisi IX DPR RI perlu mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh.

Sumber

cncindonesia.com, 5 September 2022;
detik.com, 6 & 7 September 2022;
Kompas, 2, 6, & 7 September 2022;
liputan6.com, 6 September 2022;
Media Indonesia, 6 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022